

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2018). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfitri, A. (2022). Hukum Keluarga dalam Konteks Pluralisme Hukum Indonesia. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baron, R. A., & Branscombe, N. R. (2012). Social Psychology (13th ed.). Pearson Education.
- Freeman, M. (2020). A Magna Carta for Children? Rethinking Children's Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadikusuma, H. (2015). Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2020). Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2018). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2020). Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. (2017). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.

Kamil, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Muryati, L. (2021). Problematika Adopsi dan Pembatalannya. Yogyakarta: FH UGM Press.

Pandika, R. (2012). Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.

Pitlo, A. (2011). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta: Intermasa.

Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Rosana, D. (2022). Hukum Waris dan Kedudukan Anak Angkat. Bandung: Mandar Maju.

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2019). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Pers.

Satrio, J. (2012). Hukum Waris. Bandung: Alumni.

Satrio, J. (2018). Hukum Keluarga dan Status Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2019). Hukum Waris: Kedudukan Anak Angkat. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, R. H. (2019). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti, R. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2009). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Sunggono, B. (2021). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrani, A. R. (2004). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: Alumni.

UNICEF. (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (3rd ed.). New York: UNICEF.

Wahyudi, A. (2021). Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan. Bandung: Refika Aditama.

Artikel dalam Jurnal

Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat hukum peralihan hak atas tanah waris berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 64–80.

Adnyani, N. K. S. (2021). Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1), 45–58.

- Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2023). Tinjauan yuridis pewarisan anak angkat perempuan adat Batak Toba berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 119–129.
- Adnyani, N. K. S., Dantes, K. F., & Yudha, K. D. P. (2024). Hak waris anak luar kawin (astra) menurut perspektif hukum waris adat Bali (studi kasus di Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 7(1), 1–11.
- Dewi, A. A. (2021). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 28–42.
- Fajriah, K. N., Suhaidi, S., & Ningsih, S. (2025). Disparitas putusan dalam pembatalan penetapan pengangkatan anak (adopsi) oleh orang tua angkat: Analisis beberapa putusan pengadilan di Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 119–130.
- Fauzan, M. (2019). Batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia: Suatu tinjauan kritis. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 15–34.
- Herlina, N. (2020). Kedudukan keperdataan anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 85–101.
- Kunde, N. G. D. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2023). Domestic violence resulting in divorce viewed from a sociological perspective on the verdict of Singaraja Court Number 119/Pid.Sus/2022/PN SGR. *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(3), 183–192.

Lubis, M. R. (2023). Akibat hukum pembatalan penetapan pengangkatan anak terhadap status keperdataan anak angkat. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 14(1), 1–18.

Maharani, M. D., Landrawan, I. W., & Dantes, K. F. (2023). Implementasi Pasal 45 Undang-Undang No. 16/2019 tentang hak asuh anak oleh orang tua yang bercerai di Pengadilan Negeri Singaraja. *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(3), 160–182.

Mustika, D. (2021). Problematika yuridis pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 105–120.

Nontina, M. S. (2025). Akibat pembatalan wasiat terhadap harta waris yang telah dialihkan kepada pihak ketiga: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Novasi: *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 228–245.

Pangestu, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perkara pembatalan pengangkatan anak. *Jurnal Hukum Perlindungan Anak*, 4(1), 1–15.

Rizal, M., & Lubis, M. R. (2025). Kekosongan norma pengaturan tanggung jawab keperdataan pasca pembatalan pengangkatan anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 1–20.

Santoso, B. (2022). Implikasi hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 50–68.

Sulistiyono, A. (2019). Kajian yuridis pengangkatan anak dan status keperdataannya. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 14(2), 88–104.

Suriani, S., dkk. (2025). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam regulasi pengangkatan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 9(1), 28–46.

Wijayanti, A. (2022). Hak-hak anak dalam keluarga menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 40–58.

Zahara, S., dkk. (2023). Faktor-faktor penyebab pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat dan implikasinya bagi anak. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan*, 5(1), 1–28.

Karya Ilmiah

Afriadi, I., Marsudi, S., & Siswajanthry, F. (2019). Analisis pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat (Studi Kasus Perkara Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt) (Skripsi, Universitas Pakuan).

Nugroho, R. H. (2021). Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum keluarga di Indonesia (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).

Safitri, A. N. (2019). Implementasi adopsi perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia: Studi kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro (Skripsi, IAIN Metro).

Siagian, M. (2022). Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun

menurut perspektif hukum Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of the Child.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 123.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur
12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan
Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2013). General Comment No. 14
on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary
consideration (art. 3, para. 1). CRC/C/GC/14.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt.

